



# LAPORAN TAHUNAN PPID

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Tahun*  
**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Pembantu selama Tahun Anggaran 2024 yang berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Diharapkan Laporan Tahunan ini dapat menjadi acuan penilaian kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan saran sehingga Pelayanan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga laporan Tahunan ini memberi manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi NTB khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Mataram,      Maret 2025  
PPID Pembantu Bappeda Provinsi NTB

# LAPORAN TAHUNAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### TAHUN 2024

#### I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

##### a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 17.

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 81 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerja yang meliputi :

- 1) Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi
- 2) Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku
- 3) Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- 4) Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- 5) Pengujian konsekuensi;
- 6) Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- 7) Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- 8) Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### a. Sarana dan Prasarana

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan informasi publik dan layanan izin penelitian seperti komputer untuk petugas layanan dan pengunjung dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di PPID Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedia ruangan khusus PPID yang dilengkapi dengan sarana meeting di kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) Ruangan PPID dilengkapi AC, Meja dan Kursi Kerja yang sekaligus juga berfungsi sebagai Ruang Baca;
- 3) Terdapat unit / ruang Knowledge Management Center sebagai Pusat Data Bappeda Provinsi NTB.
- 4) Terdapat unit / ruang penghimpun data untuk mensupport Knowledge Management Center dalam pengumpulan data – data perencanaan pembangunan dari OPD lingkup Provinsi NTB.
- 5) Tersedia ruang tunggu serta kotak saran;
- 6) Telah tersedia display informasi berupa poster/banner mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya (ijin penelitian);





*Resepsionis*



*Ruang Operator PPID*



*Meeting Room PPID*



*Ruang Tunggu / cafe*





*Ruang Knowledge Management Center*



*Ruang Penghimpun Data*





## b. Penyediaan Informasi Publik

Sejak Tahun 2011 s.d 2024, Bappeda Provinsi NTB telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Bappeda Provinsi NTB <https://bappeda.ntbprov.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9,10 dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Setiap tahun dilakukan pembaharuan informasi dengan menginput data secara rutin dan kontinue ke website Bappeda. Disamping itu juga dilakukan perubahan dan pengembangan website Bappeda Provinsi NTB untuk layanan informasi yang lebih baik bagi masyarakat.



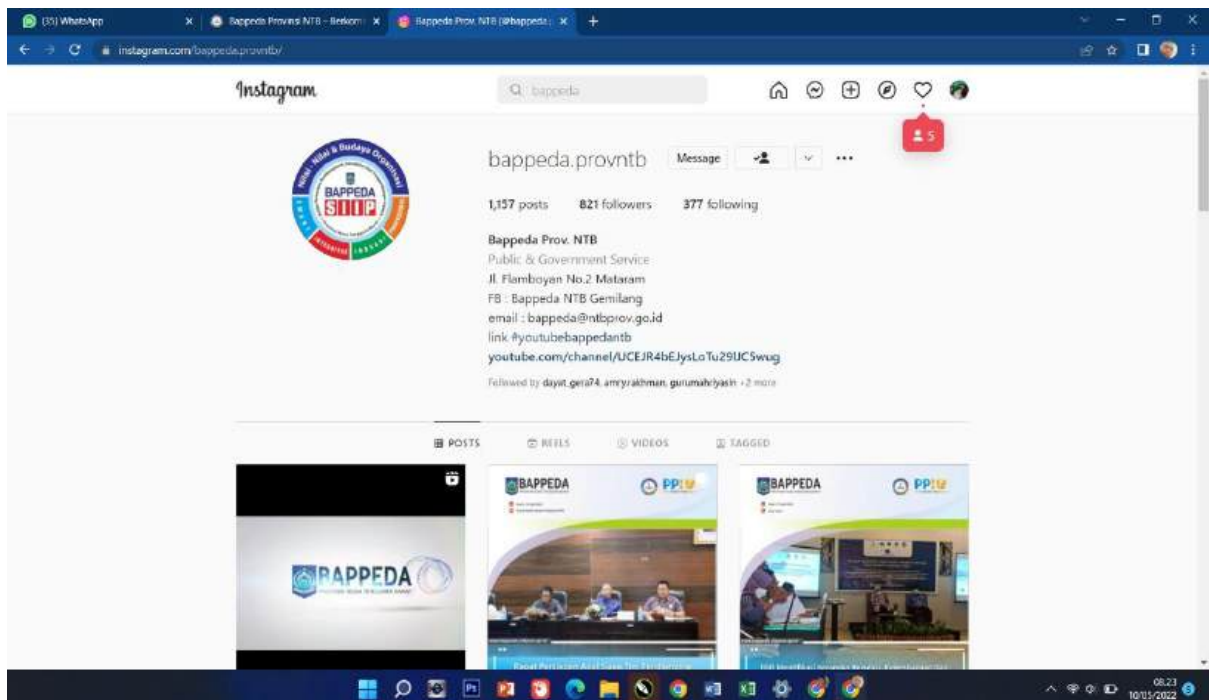
*Website Bappeda Provinsi NTB*

Selain melalui website, PPID Bappeda Provinsi NTB juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari :

1. Facebook
2. Youtube
3. Instagram

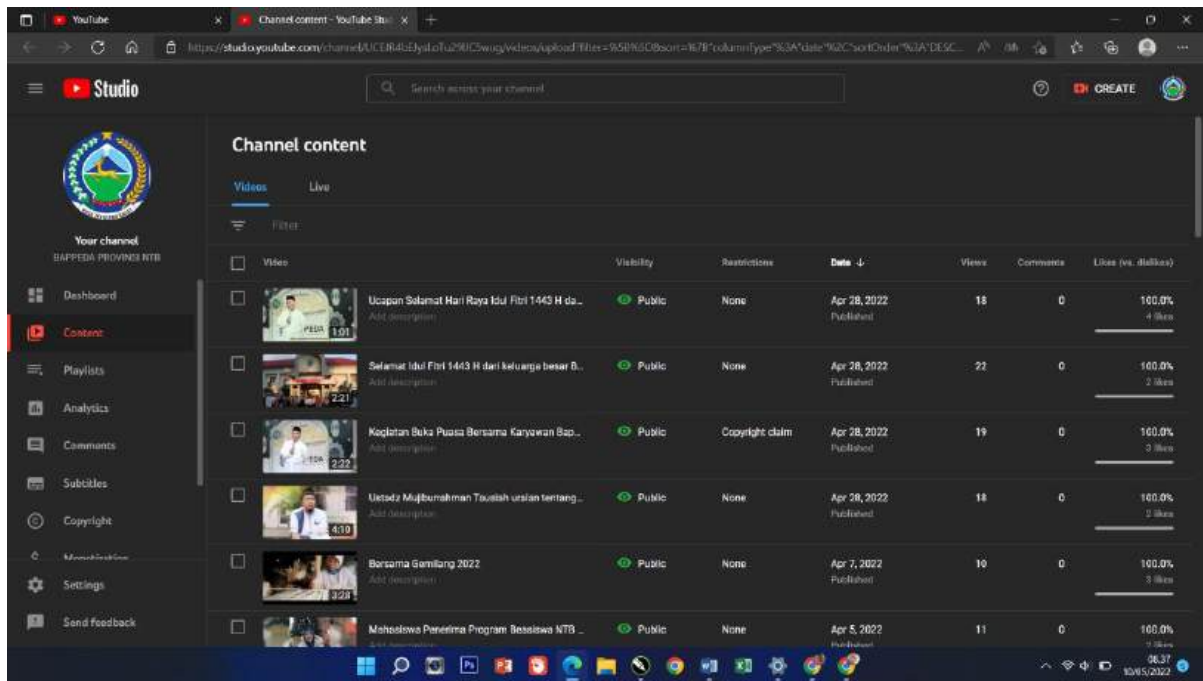


*Facebook Bappeda Provinsi NTB*



*Instagram Bappeda Provinsi NTB*





### *Channel Youtube Bappeda Provinsi NTB*

Beberapa Daftar Informasi Publik yang dihasilkan oleh Bappeda Provinsi NTB yang disampaikan melalui website <https://bappeda.ntbprov.go.id> yang dapat didownload pada link <https://bappeda.ntbprov.go.id/daftar-dokumen/>.

#### c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Sumber Daya Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 13 (tiga belas) orang Aparatur Sipil Negara yang masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural, pejabat fungsional dan staff sebagai berikut :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Atasan PPID
2.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTB	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Kesekretariatan PPID
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi

5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6.	Ni Luh Ester Yutiasih, S.Sos (Pejabat Fungsional Arsiparis)	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
7.	Erlina Agustina, ST (Pejabat Fungsional Pranata Komputer)	Anggota
8.	Maulida illiyani, SH	Anggota
9.	Didik stiawan, ST (Pejabat Fungsional Pranata Komputer)	Anggota
10.	Halimi rahman	Anggota
11.	Fian Fardianto, SH	Anggota
12.	Bestyan Dwi Prapanca	Anggota
13.	Gallantino Goldy	Anggota

d. Anggaran dan Penggunaanya

Anggaran untuk kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi melekat pada Bidang Sekretariat Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah anggaran yang tersedia diperuntukkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia Tim PPID, pengadaan sarana (LCD Projector dan Laptop Intel Core 17), penerbitan Buletin Bappeda dan kegiatan lainnya. Jumlah anggaran untuk PPID Tahun 2024 sebesar Rp.409.050.000.

e. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

- 1) Rapat-rapat intern PPID Pembantu Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk koordinasi pelaksanaan tugas;
- 2) Pelatihan Penyusunan Buletin “Rencana Kita” bagi PNS dan Non PNS lingkup Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Narasumber dari Bapak Farid Tolomundu;

- 3) Pada penilaian Badan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, meraih peringkat Informatif seperti tahun – tahun sebelumnya.

### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Bappeda Provinsi NTB

Jumlah permohonan informasi yang ditujukan ke Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dilayani dengan cara memberikan informasi langsung kepada pemohon informasi sebagai berikut (Tabel)

Jumlah data yang diminta sebanyak 16 data yang terdiri dari :

Tanggal	Pemohon	Informasi yang diminta	Untuk Keperluan
10/01/2024	Mala Mardialina	Tata Kelola Kolaborasi Jejaring Pemangku Kepentingan Dalam Bencana Gempa	Data Untuk Penelitian
01/02/2024	Mukminah	Perbedaan Karakteristik Sifat Fisik Tanah Pada Lahan Kebun Sebelum dan Pasca penambangan Batu Apung Kabupaten Lombok Timur	Data untuk Penelitian
07/03/2024	Muammar Kadafi	Evaluasi dan Produksi Perubahan Tutupan Lahan di Kawasan Hutan Desa Jangkak	Data Untuk Penelitian
08/03/2024	Muhammad Siddiqirly	Analisis Spasial Temporal Kekeringan Pertanian Berbasis Normalized Different Drought Index (NDDI) di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	Data Untuk Penelitian
18/03/2024	Lalu Ale Natabagusang	Survey kepuasan Pelanggan / Poin of Interest (PoI)	Data Untuk Penelitian
18/03/2024	Ester Eka Christy S.	Data lahan Solar Farm	Data Untuk Penelitian
04/04/2024	Prof. Dr. Ahmad Maryudi	Pengelolaan daerah Aliran Sungai Terpadu Untuk Mendorong Ketahanan Iklim Sosioekologi dan Penghidupan Masyarakat di pulau Kecil di Indonesia	Data Untuk Penelitian



		Bagian Timur	
08/05/2024	Lalu Dizky Achmad	Peta batas Wilayah, Titik Genangan (Ampenan Tengah)	Data Untuk Penelitian
15/05/2024	Baiq Ika Ariana Wulandari	Pengaruh Kepemimpinan Transformatif Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Negeri Sipil	Data Untuk Penelitian
15/05/2024	Angga Afandi Maftuh	Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap	Data Untuk Penelitian
27/05/2024	Inayah Salsabila	Proses Pencatatan Pendapatan Yang Bersumber Dari Transfer (DAK, DAU, DBHCHT) Pemerintah Pusat di PPKD	Data Untuk Penelitian
21/06/2024	Rima Elvira	Faktor Penyebab Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pembangunan Jalur Akses Terusan Bung Hatta, Kota Mataram	Data Untuk Penelitian
31/07/2024	Sabina Ngestiara Mahmuda	SHP Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Pujut, Peta Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Data Untuk Penelitian
27/09/2024	Dirjen Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM	Peta RTRW Dalam Format Soft File, Data Kepemilikan Lahan Serta Koordinat Lahan Kering, RUED Provinsi, dan Data Lainnya	Wawancara
25/10/2024	Uswatun Az Zahru	Peramalan Konsentrasi Polutan Ozon di kota Mataram Menggunakan Metode LSTM	Data Untuk Penelitian
05/12/2024	Lalu Mas Star Pilda	Wawancara Ekspor Pertanian NTB	Wawancara

Jumlah data yang tidak diberikan : tidak ada  
 Pengajuan keberatan : 0 permohonan  
 Sengketa informasi : 0 permohonan

Di tahun 2024 PPID Pembantu Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa. Semua permohonan informasi dapat dilayani dengan baik.

#### IV. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, diharapkan masing-masing Bidang di lingkup Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Sekretariat PPID agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan terutama peningkatan Sumber Daya Manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

KETUA PPID BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. MAHJULAN, SP., MP  
NIP. 197609082005011013